

DILEMA IDENTITAS DALAM KONTRADIKSI KEBIJAKAN LUAR NEGERI TURKI TERHADAP RUSIA PADA ANEKSASI KRIMEA 2014

Halida Fitriasaki

Departemen Hubungan Internasional
Universitas Airlangga

ABSTRAK

Aneksasi Krimea yang dilakukan Rusia pada tahun 2014 mendapatkan beragam tanggapan dari dunia internasional. Disebut sebagai pelanggaran hukum internasional, aneksasi tersebut berlanjut hingga tahap referendum dan terbentuknya status baru bagi Krimea. Menanggapi hal ini, Turki memandangnya sebagai aksi yang ilegal dan telah melanggar prinsip-prinsip self-determination. Turki dengan tegas menolak mengakui hasil referendum sepihak yang dilakukan Rusia dan meminta penyelesaian yang demokratis. Penolakan pengakuan serta kecaman terhadap aksi pemerintah Rusia nyatanya berhenti dalam pernyataan itu sendiri. Berbeda dengan negara-negara Barat yang menerapkan sanksi sebagai bentuk protes, Turki justru meningkatkan hubungan kerja sama dengan Rusia. Berdasarkan fenomena tersebut, laporan penelitian ini mendapatkan dua skenario berbeda kebijakan luar negeri Turki yaitu, menolak hasil referendum dan menuntut rekonsiliasi demokratis dan bersamaan dengan itu justru tidak menjatuhkan sanksi melainkan meningkatkan kerja sama dengan Rusia. Ambiguitas tersebut lantas dikaji lebih lanjut dalam kerangka identitas nasional post-strukturalisme melalui struktur lapisan identitas. Peneliti berargumen bahwa kebijakan yang kontradiktif terhadap Rusia disebabkan karena keberadaan dilema identitas dalam tiga identitas berbeda yang membawa gagasan tersendiri tentang kebijakan luar negeri. Perbedaan ini utamanya ditemukan dalam identitas Ottoman dan identitas Barat yang dimiliki Turki. Dengan demikian laporan penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh identitas dalam membentuk kebijakan luar negeri, utamanya ketika negara memiliki lebih dari satu identitas.

Kata-kata Kunci: Turki, Rusia, Aneksasi Krimea, Identitas Nasional, Kebijakan Luar Negeri, Kebijakan Kontradiktif, Struktur Lapisan Identitas

Pendahuluan

Aneksasi Rusia terhadap Krimea pada tahun 2014 mendapatkan kecaman dari dunia internasional. Negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat menilai hal ini sebagai aksi sepihak dan merupakan bentuk pelanggaran hukum internasional. Aksi yang dimulai sejak bulan Februari 2014 ini dilanjutkan dengan adanya referendum atas status Krimea. Referendum dicapai melalui voting yang menghasilkan tidak kurang dari 96.77% suara sepakat untuk kembali menjadi bagian dari

Federasi Rusia.¹ Hal tersebut juga turut diungkapkan oleh Vladimir Putin dalam pidato yang disampaikan pada 18 Maret 2014 di Kremlin “more than 82% of the electorate took part in the vote. Over 96% of them spoke out in favour of reuniting with Russia. These numbers speak for themselves.”²

Otoritas Rusia di Ukraina menyatakan bahwa referendum dilakukan tanpa adanya kekerasan dan paksaan.³ Dalam menyikapi kembalinya Krimea ke dalam Federasi Rusia, masyarakat terbagi menjadi dua pendapat. Tatar Krimea menolak untuk bergabung dengan Rusia karena terdapat rekam jejak kolonialisme, teror, deportasi, dan diskriminasi kolektif pada abad ke-19 yang dilakukan oleh pemerintah Soviet. Sementara masyarakat keturunan Rusia—dengan jumlah yang lebih mendominasi—secara penuh menyetujui reunifikasi.⁴ Menanggapi situasi tersebut, Turki dengan tegas mengecam aneksasi dan menolak hasil referendum. Krimea memegang arti sangat penting bagi Turki karena berfungsi sebagai pintu ke Ukraina, sebagai tempat Tatar Krimea yang dianggap bagian dari orang-orang *Turk*, dan warisan budaya Ottoman.⁵ Dalam konferensi pers yang diadakan menyusul Pertemuan Dewan Strategis Tingkat Tinggi Turki-Ukraina ke-5, Recep Tayyip Erdogan mengungkapkan bahwa Turki tidak mengakui referendum atas Krimea dan tetap mendukung kedaulatan, integritas teritorial dan kesatuan politik di Ukraina. Oleh karena itu, Ankara akan mengambil langkah-langkah diplomatik untuk mengatasi situasi yang tidak sah.⁶

Melalui laman resmi Kementerian Luar Negeri Turki, dimuat pernyataan bahwa Turki tidak mengakui referendum sepihak dan menekankan pentingnya keamanan dan keselamatan Tatar Krimea. Selain itu juga diperlukan solusi yang demokratis, sesuai hukum dan kesepakatan internasional.⁷ Berdasarkan kebijakan ini dan pernyataan yang dikeluarkan oleh presiden maupun menteri luar negeri, Turki memerjuangkan keberlangsungan warisan budaya yang ada di Krimea

¹ Anton Bebler, “Crimea and the Russian-Ukrainian Conflict,” *Romanian Journal of European Affairs*, 15, no. 1 (2015): 42.

² President of Russia, *Address by President of the Russian Federation*, <http://en.kremlin.ru/events/president/news/20603> (diakses pada 15 Agustus 2019).

³ Bebler, “Crimea and Russian-Ukrainian Conflict,” 43.

⁴ *Ibid*

⁵ Mikhail Kalishevskiy, *Recep Erdogan's Crimean Dilemma*, *Ferghana News*, 19 September 2014, <http://enews.ferghananews.com/articles/2886> (diakses pada 10 Maret 2018).

⁶ TCCB, *Turkey will not recognize the unlawful annexation of Crimea*, <https://www.tccb.gov.tr/en/news/542/40105/turkey-will-not-recognize-the-unlawful-annexation-of-crimea.html> (diakses pada 10 Maret 2018).

⁷ MFA, No: 86, 17 March 2014, Press Release Regarding the Referendum held in Crimea, http://www.mfa.gov.tr/no_-86_-17-march-2014_-press-release-regarding-the-referendum-held-in-crimea.en.mfa (diakses pada 10 Maret 2018).

dan termasuk melindungi hak-hak Tatar Krimea karena adanya reunifikasi. Langkah-langkah demokratis yang dinyatakan pemerintah Turki nyatanya berhenti dalam pernyataan itu sendiri. Sebab apabila dilihat dari negara-negara lain yang mengambil langkah diplomatis dengan memberlakukan embargo terhadap Rusia, Turki justru meningkatkan hubungan perekonomiannya. Oleh karena itu, hal ini dianggap kontradiktif dengan kebijakan awal yang diambil. Presiden Turki maupun otoritas pemerintah lain tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi yang memuat sanksi maupun larangan terhadap Rusia. Cavusoglu dalam wawancaranya untuk Daily Turkiye mengungkapkan bahwa "...we don't rush into it. We are looking into weather we can find other ways to solve the problem."⁸

Untuk itu terdapat dua skenario yang menggambarkan kebijakan luar negeri Turki dalam hubungannya dengan kasus ini. Skenario pertama, kebijakan untuk tidak mengakui referendum dan mendorong rekonsiliasi yang lebih demokratis. Di sisi lain, pertimbangan untuk tidak menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia adalah skenario kedua yang bertentangan dengan kebijakan awal. Kontradiksi yang terdapat dalam dua skenario ini kemudian dapat dikonstruksi oleh faktor-faktor domestik maupun internasional. Dengan melihat aspek domestik negara dan menelusuri lebih jauh dari kondisi politik dalam negeri, aspek identitas nasional juga dianggap dapat menjelaskan fenomena tersebut. Pemilihan unsur identitas nasional untuk menjabarkan kontradiksi kebijakan luar negeri Turki diambil dengan mempertimbangkan beragam identitas yang dikaitkan dengan Turki. Salah satu pernyataan dari mantan Presiden Turki, Suleyman Demirel, bahwa Turki memiliki banyak warisan budaya dan dalam beberapa hal memiliki banyak identitas. Sebagai individu, identitas tidak dapat disimpulkan dalam satu kata dan hal tersebut juga berlaku bagi identitas Turki.⁹

Post-Strukturalisme dan Lapisan Identitas

Dalam artikel *Identity, Communities and Foreign Policy: Discourse Analysis as Foreign Policy Theory* Waever berpendapat bahwa konsep identitas yang diungkapkan oleh konstruktivisme

⁸ Huriyet Daily, *Turkey Says it is Against EU Sanctions on Russia*, 11 Agustus 2017, <http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-says-it-is-against-eu-sanctions-on-russia---116601> (diakses pada 17 Agustus 2019).

⁹ Suleyman Demirel, *A Role Model at Turbelent Crossroads*, Washington Institute, 1999, http://www.washingtoninstitute.org/policy-nalysis/view/Turkey-a-role-model-at-turbulent-crossroads_full-transcript (diakses 13 Desember 2017).

adalah ideasional sehingga menjadikan identitas kental dengan unsur kultural dan cenderung retorik. Selain itu, konstruktivisme juga dianggap tidak mampu untuk menjelaskan perihal perubahan kebijakan luar negeri. Identitas dalam pendekatan konstruktivisme berkonsentrasi pada teori sistemik internasional dan melihat identitas dalam makna umum sebagai negara, bentuk kedaulatan atau pun anarki.¹⁰ Sementara itu, post-strukturalisme menekankan pada konstruksi atas diri sendiri atau *self* daripada melibatkan peran *other* atau identitas lain dengan tujuan untuk menggambarkan kedalaman struktur yang ada. Apabila pemahaman tersebut semakin baik maka semakin kecil kemungkinan perubahan dalam identitas. Identitas dalam hubungan internasional merupakan konstruksi diskursif dan simbolis.

Salah satu unsur yang ditekankan dalam analisa post-strukturalis adalah bahasa. Bahasa dipahami sebagai sebuah sistem pemaknaan dan pada dasarnya bukan pemilihan kata yang dipermasalahkan tetapi makna dari penggunaan kata-kata tersebut.¹¹ Hal ini merupakan salah satu poin yang membedakan post-strukturalis dengan konstruktivis. Lebih lanjut, untuk dapat menjelaskan mengenai politik atau kebijakan luar negeri dapat dilakukan melalui model struktural yang berdasar pada diskursus nasional.¹² Dengan artian bahwa dokumen dan teks nasional suatu negara menjadi sumber analisis untuk menemukan identitas nasional dan keterkaitannya dengan kebijakan luar negeri.

Model struktural dengan berdasar pada diskursus nasional tersebut diuraikan dalam struktur berlapis post-strukturalisme yang terdiri atas tiga lapisan. Lapisan pertama, kedalaman pemahaman mengenai identitas diri. Terdapat lima prinsip dasar yang digunakan untuk membangun analisa dalam level ini. Lima hal tersebut adalah; a) mempertanyakan mengenai konsep negara dan bangsa sebagai sebuah kesatuan atau dua hal yang berdiri sendiri; b) mendalami konstruksi sebagai bangsa; c) perihal gagasan mengenai negara, maka perlu untuk mencaritahu peran dimensi eksternal dan internal kemudian bagaimana negara dibangun sepanjang dua dimensi tersebut; d) mencaritahu kemungkinan keberadaan unsur pelengkap atau *attachment* terhadap gagasan sebagai bangsa; e) kemungkinan untuk menemukan konsep lain yang dapat

¹⁰ Ole Waever, "Identity, Communities and Foreign Policy: Discourse Analysis as Foreign Policy Theory", in *A European Integration and National Identity: The Challenge of the Nordic States*, ed. Lena Hansen & Ole Waever (London: Routledge, 2002): 21.

¹¹ *Ibid*, 30

¹² *Ibid*

menggambarkan keterkaitan yang sebenarnya antara negara dan bangsa atau bangsa dengan unsur pelengkap yang ada.¹³ Lapisan kedua, hubungan dengan identitas lain. Melihat ada atau tidaknya kemungkinan dari konstelasi dasar pada lapisan pertama memiliki relasi dengan identitas lain. Relasi antara konstruksi negara-bangsa dan identitas lain yang dalam sejumlah hal tetap menyisakan ruang untuk adanya pemaknaan lain yang dapat dilihat dari ada atau tidaknya *attachment* yang kemudian memengaruhi konstruksi negara *vis-a-vis* identitas lain.

Lapisan ketiga, tindakan yang sebenarnya. Sejalan dengan adanya kebijakan konkret terkait isu yang diperdebatkan juga ditemui kelompok aktor tertentu. Aktor politik dalam lapisan ini kemudian memperjelas identitas yang ada melalui kebijakan dibandingkan dengan abstraksi yang terdapat pada lapisan kedua dan pertama. Pada lapisan ketiga, aktor terlibat dalam perdebatan tentang posisi dan konstruksi yang ada. Perbedaan pandangan antar aktor kemudian memungkinkan penilaian yang berbeda. Aktor dapat menentang satu sama lain, dan hal ini dapat terjadi dalam tiga cara: pertama, mempermasalahkan adanya kesalahan atau kegagalan dalam konstruksi yang sesuai pada lapisan pertama yang tidak menyertakan unsur penting seperti identitas kultural dari bangsa atau ikatan yang diperlukan antara negara dan bangsa; kedua, interpretasi atas identitas lain yang dikonstruksi dalam *self* dapat menjadi ancaman terhadap konstruksi yang tepat bagi konstelasi negara-bangsa; ketiga, interpretasi yang melenceng dari realita yang disajikan atas identitas lain.¹⁴ Masing-masing dari lapisan ini dapat saling memengaruhi dan kemudian melalui struktur ini dapat dipahami mengenai adanya perubahan dalam kebijakan.

Dilema Identitas dan Kebijakan Kontradiktif

Dilema identitas terjadi karena keberadaan multipel identitas sebab setiap individu setidaknya memiliki tiga tipe identitas berbeda yaitu sosial, personal, dan kolektif. Keberadaan multipel identitas tersebut kemudian memungkinkan adanya tumpang tindih terhadap identitas atas *self*.¹⁵ Dalam multipel identitas itu sendiri terdapat satu identitas yang sifatnya mendominasi dan berada

¹³ Ole Waever, "Identity, Communities and Foreign Policy: Discourse Analysis as Foreign Policy Theory", in A European Integration and National Identity: The Challenge of the Nordic States, ed. Lena Hansen & Ole Waever (London: Routledge, 2002): 36.

¹⁴ *Ibid*, 38.

¹⁵ David A. Snow, "Identity Dilemmas, Discursive Fields, Identity Work, and Mobilization: Clarifying the Identity-Movement Nexus," in The Future of Social Movement Research, ed. Jacquelin van Stekelenburg et al (Minnesota: University of Minnesota Press, 2013): 266.

dalam hierarki teratas atau yang juga dapat dianggap sebagai inti. Penempatan identitas tertentu sebagai inti atau yang berada dalam posisi tertinggi dalam hierarki yang ada menunjukkan bahwa identitas tersebut memiliki kelebihan seperti relevansi dengan situasi yang dihadapi dan sejauh mana individu telah melakukan aksi yang kemudian sesuai dengan konten atau narasi-narasi dalam identitas tersebut. Stryker mengungkapkan perihal komitmen terhadap identitas tertentu dilihat dari sejauh mana hubungan dengan *other* didasarkan pada identitas tersebut.¹⁶

Dalam struktur identitas berlapis post-strukturalisme keberadaan multipel identitas Turki kemudian dapat dipahami sebagai *multi layer identity* yang lantas memungkinkan untuk akomodasi kepentingan dengan mobilisasi yang lebih fleksibel terhadap situasi yang dihadapi. Artinya adalah *self* dengan identitas yang beragam dapat menyesuaikan identitas mana yang digunakan pada situasi yang berbeda-beda. Lebih lanjut, penyesuaian tersebut memungkinkan *self* untuk mendapatkan keuntungan. Abstraksi ini lantas dapat dilihat lebih jelas dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam hubungannya dengan suatu kasus. Lantas, penyesuaian tersebut juga memungkinkan untuk adanya situasi yang mana ada lebih dari satu identitas yang dirasa penting untuk ditunjukkan sehingga kebijakan yang nantinya dikeluarkan merefleksikan dua atau lebih identitas. Dengan demikian kebijakan yang ada menjadi kontradiktif.

Kata kontradiksi itu sendiri mengandung makna kombinasi pernyataan atau ide yang bertentangan satu sama lain, situasi dimana terdapat elemen yang tidak konsisten.¹⁷ Pernyataan yang dianggap bertentangan atau kontradiktif harus melibatkan peristiwa yang sama. Hal ini secara sederhana dapat digambarkan dalam kalimat seperti *setuju tetapi juga tidak setuju* atau sebaliknya.¹⁸ Apabila menggunakan kebijakan Turki terhadap Rusia sebagai studi kasus maka kontradiksi yang ada dapat dilihat dari tidak adanya kesinambungan antara pernyataan penolakan Turki terhadap aneksasi dan referendum Krimea dengan ketiadaan kebijakan lebih lanjut sebagai mediator maupun pemberian sanksi terhadap Rusia—terlepas dari penilaian kapabilitas Turki untuk memberikan sanksi. Dengan demikian terdapat ide atau elemen yang tidak sejalan dengan kebijakan awal Turki dalam hubungannya dengan kasus tersebut.

¹⁶ *Ibid*, 268-269.

¹⁷ En.oxforddictionaries.com <https://en.oxforddictionaries.com/definition/contradiction>

¹⁸ Julie Spencer-Rodgers et al, 'The Dialectical Self-Concept: Contradiction, Change, and Holism in East Asian Cultures', 2009 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2811254/>

Identitas Ottoman dan Pemahaman Turki terhadap *Self*

Turki sebagai sebuah bangsa dan negara memiliki kebanggaan tersendiri atas Ottoman. Lantas kebanggaan tersebut dipahami tidak sekadar bagian dari masa lalu. Artinya adalah Ottoman dan bagaimana Turki memahami *self* dapat dipahami sebagai hal yang sama. Dengan kata lain Turki adalah Ottoman itu sendiri. Tentu saja, dalam banyak hal terdapat perubahan yang kemudian menjadi distingsi atas keduanya. Tetapi kejayaan Ottoman serta kepercayaan diri para sultan sebagai pemimpin besar umat masih merupakan kebanggaan dan bagian dari Turki. Hal ini kemudian disalurkan dengan adanya rehabilitasi kekaisaran melalui berbagai elemen, seperti budaya populer kontemporer¹⁹ dan tentu saja kebijakan-kebijakan luar negeri.

Sebagai contoh, perilisian film *Conquest 1453* yang menceritakan tentang Sultan Mehmet II dan keberhasilannya dalam mengambil alih Konstantinopel menjadi film terlaris tertinggi dalam sejarah perfilman Turki dan dirilis di 12 negara di Timur Tengah, di Jerman dan Amerika Serikat. Keberhasilan film ini telat turut membangkitkan rasa kebanggaan pada orang-orang Turki yang dalam contoh sederhananya ditunjukkan dengan minat untuk menggunakan pakaian seperti sultan dan bangsawan Ottoman. Melis Behlil yang merupakan profesor di Kadir Has University mengungkapkan bahwa “the Ottoman revival is good for the national ego and has captured the psyche of the country at this moment, when Turkey wants to be a great power.” Melalui pernyataan ini dapat diketahui bahwa film tersebut tidak sebatas sebagai karya tetapi lebih daripada itu memiliki pengaruh yang kembali membangkitkan memori kejayaan dalam sejarah Turki sebagai Ottoman. Pada saat yang bersamaan juga merefleksikan kebanggaan sebagai bagian dari orang-orang Turki atau *Turk*. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh sutradara dari film *Conquest 1453*, Faruk Aksoy, “The Turks are proud about the conquest because it not only changed our history but it also changed the world.”²⁰

Davutoglu mengungkapkan bahwa Turki adalah kekuatan besar yang telah mengabaikan ikatan historis dan hubungan diplomatik, ekonomi, dan politik dengan negara-negara tetangganya yang berasal dari era Ottoman. Neo-Ottomanisme kemudian dapat diartikan sebagai upaya untuk menyadarkan Turki tentang memori historis yang dimiliki. Utamanya dalam kembali merangkul

¹⁹ Dan Bilefsky, As if the Ottoman Period Never Ended, The New York Times, 29 Oktober 2012, <https://www.nytimes.com/2012/10/30/movies/in-turkey-ottoman-nostalgia-returns.html> (diakses 10 September 2019).

²⁰ *Ibid*

bangsa dan negara yang berbagi sejarah yang sama dengan Ottoman. neo-Ottomanisme mengacu pada kebijakan luar negeri Turki yang memainkan peran lebih aktif dalam kerangka geografis Ottoman, seperti negara-negara Balkan dan Timur Tengah. Tidak hanya mengatur kebijakan luar negeri Turki sebagai seperangkat cita-cita, nilai, etika, dan norma, namun lebih dari itu yaitu definisi penting tentang bagaimana Turki mendefinisikan dirinya sendiri. Ada hubungan yang saling berkaitan antara bagaimana *self* didefinisikan dan bagaimana hal tersebut mencerminkan kepentingan nasional. Neo-Ottomanisme adalah tentang membangun identitas nasional yang baru dan menerjemahkannya ke dalam kebijakan luar negeri dengan menggunakan ikatan historis, budaya, dan agama dengan wilayah bekas Ottoman.

neo-Ottomanisme menjadi semakin menguat bersama dengan kepemimpinan Erdogan dan partai *Adalet ve Kalkınma Partisi* (AKP). Turki lebih menekankan pada penggunaan *soft power*—terutama di negara-negara bekas Ottoman. Ideologi ini juga menitikberatkan pada konsep multikultural daripada kelompok yang homogen. Selain itu, neo-Ottomanisme juga memunculkan karakteristik keanggunan dan kepercayaan diri dalam kebijakan luar negeri. Memandang diri sebagai kekuatan regional, sebagai negara pivot yang harus lebih aktif dalam peran diplomatik, politik, dan peran ekonomi. Lebih daripada itu, neo-Ottomanisme juga dapat dianggap sebagai sebuah antitesis untuk menyeimbangkan orientasi Barat dan Islam.²¹ Ahmet Davutoglu dalam AK Party Kizilcahan Camp mengungkapkan bahwa Turki memiliki legasi Ottoman, oleh sebab itu Turki adalah bentuk baru dari Ottoman yang harus lebih peduli terhadap kawasan. Diskursus tentang neo-Ottomanisme kemudian terkait dengan kata-kata kunci seperti berperan aktif dalam politik global dan utamanya kawasan, akar budaya dan kejayaan Ottoman, modern dan sekaligus religius. Peran aktif Turki dalam politik global dan utamanya di kawasan menjadi narasi yang vokal dan banyak diungkapkan baik oleh elit partai AKP dan Presiden Turki sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Cinar Kiper dalam artikel *Sultan Erdogan: Turkey's Rebranding Into the New, Old Ottoman Empire* bahwa Erdogan dan AKP berupaya untuk melakukan *rebranding* Turki.²²

²¹ *Ibid*

²² Cinar Kiper, *Sultan Erdogan: Turkey's Rebranding Into the New, Old Ottoman Empire*, <https://www.theatlantic.com/international/archive/2013/04/sultan-erdogan-turkeys-rebranding-into-the-new-old-ottoman-empire/274724/> (diakses 15 Juni 2019).

Identitas Barat dan Islam dalam Diskursus Nasional Turki

Pembangunan identitas nasional Turki berada dalam kerangka modernisasi yang menyangkut reformasi dalam bidang formal dan legislatif, meningkatkan rasionalitas, birokratisasi dan efisiensi organisasi, serta melakukan transformasi menyeluruh dalam aspek sosial dan budaya. Modernisasi dan gerakan reformasi berlangsung secara *top-down* serta merupakan sikap paternalistik oleh elit negara yang dipimpin oleh Mustafa Kemal. Menjadi modern berarti menjadi bagian dari bangsa Barat sekaligus misi untuk membawa Turk pada tingkatan sosial, pendidikan, dan budaya yang sama dengan Eropa.²³ Kemalisme kemudian menjadi sebuah ideologi yang berisi ide dan gagasan Ataturk untuk Turki sebagai negara-bangsa yang baru. Sementara itu, Turkishness menjadi basis identitas nasional yang membantu mentransformasikan masyarakat tradisional ke masyarakat modern.²⁴ Lantas, sekularisasi individual dan negara adalah sebuah upaya untuk mengganti identitas yang lama dan menciptakan identitas baru.

Secara keseluruhan gagasan sekularisme Mustafa Kemal dapat dilihat lebih lanjut dalam kumpulan pidato *Ataturk Buyuk Nutuk* atau The Great Public Address. Ataturk mengungkapkan mengenai kelahiran Turki setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman, Perang Kemerdekaan Turki (1919-1923), dan pembentukan Republik (1923). *Nutuk* merupakan deklarasi publik yang komprehensif atas ideologi baru yang dimiliki Turki. Hal tersebut adalah Kemalisme yang kemudian diabadikan dalam konstitusi Turki. Hulya Adak menyebut *Nutuk* sebagai narasi diri yang merupakan memori pribadi Ataturk tentang perang kemerdekaan yang membentuk konten, struktur, argumen, dan cerita yang selanjutnya juga menjadi bagian dari memori nasional ketika *Nutuk* menjadi bagian menonjol dalam politik, budaya, dan pendidikan di Turki.²⁵

Terdapat lima poin besar dalam *Nutuk* dan poin terakhir, yaitu *modernisasi* dianggap menjadi hal utama yang sekaligus merupakan agenda nasional untuk membawa Turki pada tahapan baru sebagai negara republik yang merdeka. Tantangan utama yang Turki hadapi adalah mengangkat kehidupan nasional ke level peradaban dan kemakmuran, Turk harus mengangkat kultur dan budaya nasional sampai pada peradaban tertinggi untuk masa depan. Peradaban tertinggi yang

²³ Anna Marisa Schon, *The Construction of Turkish National Identity: Nationalization of Islam & Islamization of Nationhood* (Tilburg: Tilburg University, 2013).

²⁴ Yucel Bozdaglioglu, "Modernity, Identity, and Turkey's Foreign Policy," *Insight Turkey* 10, no. 1. (2008): 60.

²⁵ Aysel Morin & Ronald Lee, "Constitutive Discourse of Turkish Nationalism: Ataturk's *Nutuk* and the Rhetorical Construction of the "Turkish People"," *Papers in Communication Studies* (2010).

kemudian dimaksudkan dapat diinterpretasikan lebih lanjut sebagai peradaban Barat. Dengan demikian dalam konteks modernitas atau masa depan Turki sebagai bangsa yang baru terdapat dua kata kunci yang selalu digunakan yaitu *uygarlik* atau peradaban dan *laiklik* atau sekularisme. Kemudian dalam pandangan Atatürk terhadap masa depan dunia yang modern tidak terdapat tempat untuk kekaisaran yang multi nasional melainkan hanya ada negara-bangsa yang satu dengan identitas yang sama.²⁶

Narasi-narasi pro-barat kemudian dapat ditemukan dalam masa pemerintahan yang berbeda-beda. Dalam pemerintahan Suleyman Demirel, selain mengekspresikan pandangannya sesuai dengan prinsip Kemalis, Demirel juga menunjukkan pendekatan Barat dengan mengungkapkan bahwa “Turkey should be with Europe, not apart.”²⁷ Keanggotaan tersebut merupakan tonggak penting dalam berbagai upaya untuk menjadikan Turki sebagai bagian dari Barat. Urgensi keanggotaan Turki di NATO lebih lanjut dapat dilihat dari pernyataan Ali Karaosmanoglu yang mengungkapkan bahwa keputusan Turki untuk bergabung di NATO didorong oleh keyakinan terhadap nilai-nilai Barat dan *virtue* dari sistem politik Barat. Tidak kurang dari itu juga menjadi sebuah bentuk orientasi Barat dengan membangun hubungan kelembagaan dan fungsional jangka panjang dengan negara-negara Barat. Oleh karena itu NATO tidak sekadar dipandang sebagai organisasi pertahanan tetapi juga turut membantu membentuk identitas masing-masing negara anggota. Dengan kata lain, keanggotaan di NATO menjadi sebuah poin yang membedakan negara-negara Barat dengan Timur.²⁸

Meskipun Turki dengan sungguh-sungguh ingin melepaskan Ottoman dan Islam dari sejarah dan masa depan Turki, Islam pada dasarnya masih dan terus menjadi bagian dari negara itu sendiri. Dilihat lebih jauh, Islam menjadi bagian dari individu yang sukar dipisahkan. Sementara itu, mengutip pemaparan Fox dan Sandler dalam *Bringing Religion Into International Relations* pemimpin negara dapat menggunakan pemahaman keagamaan yang umum mengenai penduduk mereka sendiri dan untuk negara lain dengan tujuan melegitimasi pilihan kebijakan luar negeri serta mengumpulkan dukungan.²⁹ Negara-negara dengan agama yang sama memiliki tingkat

²⁶ *Ibid*

²⁷ Evrim Gurel, *Turkey and the West: Change in Continuity? A Two-way Approach to Turkey's Relation with the West*. (Lund University, t.t).

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

afinitas ideologis yang signifikan. Tesis ini berangkat dari pemahaman Huntington mengenai peradaban dan bahwa agama masuk menjadi fitur dalam konsep kultural yang sejalan dengan itu pun merupakan konstruksi dari peradaban³⁰ dan esensi dari sebuah identitas.

Berkembangnya Kemalisme sejalan dengan upaya marginalisasi dan kontrol terhadap institusi-institusi Islam. Pada kenyataannya pengaruh Islam di masyarakat masih dominan dan westernisasi dibangun di atas identitas Islam yang termarginalisasi. Pada akhir 1980an dan 1990an politik Islam berkembang menjadi sebuah ideologi yang menentang identitas Barat di dalam negeri dan kebijakan luar negeri. Islamisasi bertahap terjadi pada politik Turki tahun 1980an dikarenakan kebijakan pemerintah militer mendorong kebangkitan agama. Indikasi paling penting dari kebangkitan Islam dalam aspek politik di Turki ditunjukkan dengan adanya perluasan kekuatan pemilihan Partai Kesejahteraan Islam (WP) yang ditunjukkan oleh hasil pemilihan lokal pada tahun 1994 yang memenangkan 19.7% suara nasional dan walikota pro-Islam yang berkuasa di 29 kota termasuk Istanbul dan Ankara. Kemudian pemilihan lokal tahun 1995 ketika WP muncul sebagai partai terkuat dengan 21% total suara dan 158 kursi dari 550 kursi di parlemen.³¹

Tahun 1996, tepatnya pada 28 Juni partai WP menjalin koalisi dengan True Path Party (TPP) dan Erbakan dipilih menjadi perdana menteri. Hal ini sekaligus menandai pertama kalinya Republik Turki memiliki perdana menteri yang memiliki ideologi Islam. Koalisi ini juga menyoroti dualitas identitas Turki yang kemudian berdampak pada kebijakan luar negeri.³² Kebangkitan partai Islam kemudian kembali didapati pada pemilihan yang diselenggarakan pada 3 November 2002. Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan memenangkan 34.3% suara nasional dan dua per tiga kursi di parlemen.³³ Meski pernyataan dari pemimpin AKP mengungkapkan bahwa partai tersebut bukan partai Islam tetapi adopsi nilai-nilai Islam dapat dilihat dengan jelas. Mendeskripsikan diri sebagai partai konservatif, AKP menekankan pada demokrasi, hak asasi, penegakan hukum, dan termasuk memberikan dukungan pada sekularisme. Peran yang seharusnya dimiliki Turki dalam sistem internasional akan

³⁰ *Ibid*

³¹ Yucel Bozdaglioglu, "Modernity, Identity, and Turkey's Foreign Policy," *Insight Turkey* 10, no. 1. (2008): 65.

³² *Ibid*

³³ *Ibid*, 68.

tergantung pada konsepsi dan latar belakang budaya yang dimiliki oleh pemimpin yang sekaligus membentuk identitas mereka.

Kontradiksi Kebijakan Luar Negeri Sebagai Implikasi Dilema Identitas

Dalam hubungannya dengan kebijakan Turki terhadap Rusia, diskursus yang banyak diungkapkan langsung oleh elit-elit politik Turki adalah: pertama, penyelesaian dengan jalan demokratis; kedua, stabilitas kawasan dan menjadi penengah dalam konflik; ketiga, memperjuangkan warisan budaya Ottoman—Tatar Krimea dianggap sebagai bagian dari Ottoman dan Turki. Kemudian, mempertimbangkan posisinya sebagai anggota NATO, Turki memiliki pandangan yang sama dengan negara-negara anggota lainnya dalam hal integritas teritorial Ukraina dan invaliditas referendum yang dijalankan oleh Rusia atas Krimea.³⁴ Turki sejatinya berada pada posisi yang tidak strategis dalam kasus aneksasi Krimea. Secara tidak langsung Turki harus dapat menyeimbangkan kebijakannya, baik untuk Rusia maupun Ukraina dan termasuk Tatar Krimea.

Legasi historis Turki, Tatar Krimea, meski tidak cukup dominan nyatanya masih dapat membangun narasi tersendiri di Turki. Pernyataan Davutoglu dalam Hurriyet Daily News yang dimuat pada 19 Maret 2014 berbunyi “we would like Crimean Tatars to see us as the guarantor for their presence there... and we will act in accordance with this view”³⁵ Lebih lanjut dikutip dari Eurasianet, Ahmet Davutoglu menyatakan bahwa sikap perdana menteri dan presiden tidak akan berbeda terhadap berbagai isu yang memberikan dampak bagi kerabat di Krimea dan di mana pun di dunia. Ankara pada dasarnya membangun narasi yang diplomatis untuk Krimea maupun Rusia. Peneliti meyakini bahwa Turki memiliki tekanan lebih kuat dengan mengingat Tatar Krimea sebagai legasi historisnya. Artinya adalah, Turki memiliki alasan lebih untuk kemudian dapat menerapkan kebijakan yang lebih jauh dari sekadar menjadi mediator maupun retorika penyelesaian dengan berdialog. Di samping narasi historis tersebut, terdapat faktor lain yang seharusnya membuat Turki juga turut menerapkan sanksi bagi Rusia. Yaitu pelanggaran hukum internasional dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Poin-poin demokratis yang meyelaraskan dengan kebijakannya yang berorientasi barat. Nyatanya, tidak ada kebijakan maupun pernyataan untuk menerapkan sanksi, pun tidak terdapat upaya lebih dari Turki

³⁴ Levent Basturk, “Turkey’s Policy Towards Ukraine: Crimean Crisis,” <https://www.worldbulletin.net/news-analysis/turkeys-policy-towards-ukraine-crimea-crisis-h132095.html> (diakses 6 April 2019).

³⁵ Hurriyet Daily News, “ Turkey Stands with EU and NATO on Crimea: Davutoglu,” 19 Maret 2014, www.hurriyetdailynews.com/turkey-stands-with-eu-and-nato-on-crimea-davutoglu-63790, (diakses 18 Oktober 2019).

untuk membantu mengatasi situasi Tatar Krimea. Sikap yang cenderung ragu-ragu tersebut kemudian dapat ditunjukkan lebih lanjut dalam wawancara Zakhid Gul dengan IslamNews:

“The Russian leadership promised the Crimean Tatars would have more rights on the peninsula than before. If the promise do come true, then the problem of annexing Crimea to Russia, which the West is inflating, would be taken off the political agenda in Turkey. Because the most important [factor] for Turkey in the Crimean issue is the protection of historic justice in regards with the indigenous nation of the peninsula, the Crimean Tatars, that is, and guaranteeing their rights.”³⁶

Signifikansi dari pertanyaan identitas berasal dari fakta bahwa Turki mengalami modernisasi dalam bentuk Westernisasi yang dalam banyak hal dianggap sebagai sesuatu yang asing. Diskursus modernisasi dalam kerangka negara-negara Barat telah menolak gagasan Islam, baik dalam bentuk kultural maupun nilai-nilai politiknya. Karal menyatakan bahwa modernisasi ialah sebuah upaya untuk mengalahkan imperialisme Barat dengan mengadopsi nilai-nilai Barat itu sendiri. Dalam konteks individu, Sen mengungkapkan bahwa penting untuk menyadari seseorang tidak dapat didefinisikan berdasarkan agama, satu budaya, atau peradaban homogen dan kemudian mengabaikan berbagai faktor lain yang pada kenyataannya menjadikan seseorang sebagai *self* yang dipahaminya.³⁷

Memiliki multipel identitas pada dasarnya memberikan keuntungan tersendiri seperti dalam hal mobilisasi ekonomi, dan akumulasi kemampuan yang memungkinkan terciptanya fleksibilitas dalam *self* untuk menyesuaikan pilihan yang menguntungkan atau memberikan manfaat dengan menunjukkan identitas tertentu. Meski demikian, kombinasi multipel identitas tidak selalu mudah untuk dinegosiasikan. Keberadaan multipel identitas menjadi sebuah gangguan tersendiri karena adanya tekanan dari satu identitas dapat mengganggu kinerja identitas lainnya.³⁸ Masing-masing identitas kemudian memiliki muatan kultural tersendiri yang menyediakan naskah perilaku yang sesuai dengan gagasan kulturalnya. Lantas perbedaan unsur kultural yang menghasilkan ekspektasi normatif yang berbeda menyebabkan gangguan identitas karena tidak mudah untuk melakukan perpindahan dari satu identitas ke identitas lain. Kesulitan memberlakukan identitas dengan budaya yang berbeda kemungkinan akan diperparah ketika terdapat motivasi untuk

³⁶ Mikhail Kalishevskiy, *Recep Erdogan's Crimean Dilemma*, Fergana News, 19 September 2014, <http://enews.fergananews.com/articles/2886> (diakses pada 10 Maret 2018).

³⁷ Amartya Sen, *Identity and Violence: The Illusion of Destiny* (New York: Norton, 2006).

³⁸ Isis H. Settles, *When Multiple Identities Interfere: The Role of Identity Centrality Personality and Social Psychology Bulletin* 30, No. 4 (2004).

mempertahankan dan menunjukkan kedua identitas dengan baik dan dalam waktu yang bersamaan.³⁹

Telhami dan Barnett mengungkapkan bahwa Turki memiliki hierarki identitas dengan satu pilar sementara yang lainnya diaktifkan selama situasi sosial tertentu tetapi tidak merusak pilar.⁴⁰ Terkadang, identitas-identitas yang ada dapat berintegrasi dengan cukup harmonis meski tidak jarang lebih konflikual satu sama lainnya.⁴¹ Turkishness (Identitas Keturkian/Turkifikasi) disebut sebagai pilar karena selama masa pembentukan negara republik, Turki membutuhkan satu gagasan yang dapat menyatukan orang-orang Turki dan guna membangun narasi kebersamaan sebagai negara-bangsa yang baru. Kemudian hal tersebut pun juga tidak lepas dari diskursus orientasi barat, baik dalam pembentukan identitas nasional maupun kebijakan-kebijakan luar negerinya. Lantas, kebijakan yang kontradiktif dihasilkan karena Turki berupaya untuk menunjukkan dua identitas berbeda dalam satu waktu sementara keduanya masih dianggap penting. Menyeimbangkan kebijakannya bagi Rusia yang di kawasan, sekutu baratnya, dan tidak terkecuali Tatar Krimea sejawatnya. Sehingga berada dalam situasi tersebut membuat Turki memilih untuk terus membangun narasi sebagai pemimpin di kawasan dengan menjadi mediator untuk menjaga stabilitas. Membela hak-hak Tatar Krimea dan kedaulatan Ukraina dengan tetap melanjutkan kerjasama dan hubungan baik dengan Rusia.

Kesimpulan

Kebijakan luar negeri Turki yang kontradiktif terhadap Rusia disebabkan karena atau merupakan implikasi dari dilema identitas. Turki memiliki lebih dari satu identitas yang lantas membawa narasi kultural berbeda dan membentuk skenario kebijakan yang berlainan. Kebutuhan untuk mempertahankan lebih dari satu identitas dalam waktu yang bersamaan membuat kebijakan luar negeri Turki menjadi kontradiktif. Dalam kaitannya dengan aneksasi Rusia terhadap Krimea, kebijakan Turki terfragmentasi dalam dua identitas yaitu identitas Ottoman dan identitas Barat. Era post-Ottoman merupakan proses konsolidasi panjang untuk membentuk identitas nasional Turki dan berkembangnya berbagai diskursus seperti: siapa yang disebut dengan Turk? Apa Turki adalah Ottoman dan sebaliknya? Turki sebagai bagian dari Eropa atau Asia? Menjadi Islam atau

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Shibley Telhami & Michael Barnett, "Identity and Foreign Policy in the Middle East, eds, Ithaca: Cornell University Press, 2002.

⁴¹ *Ibid*

tidak terikat dalam narasi agama? Poin selanjutnya yang menjadi catatan mengenai identitas Ottoman, Islam maupun Barat yaitu tidak mudah untuk menentukan di mana satu hal dimulai dan hal lainnya berakhir. Justru yang hadir adalah bagaimana ketiganya menjadi konstelasi baru yaitu sebuah kombinasi yang kemudian menjadi ciri khas tersendiri bagi identitas Turki.

Narasi ketiga identitas menjadi kompleks untuk dibagi dalam partisi-partisi berbeda, terlebih ketika ditinjau dari segi historisnya. Pun dalam konteks kontemporer, Turki dan multipel identitasnya serta implikasi dalam kebijakan luar negerinya masih menjadi ulasan yang menarik. keberadaan multipel identitas Turki memberikan kesempatan bagi Turki untuk dapat menjadi lebih fleksibel dalam kebijakannya. Kendati demikian, karena sifatnya yang dapat mengakomodasi kepentingan berdasarkan situasi yang dihadapi, negara tidak jarang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berlawanan atau kontradiktif.. Oleh sebab itu, posisi Turki dalam kasus ini sejatinya begitu riskan karena harus menyeimbangkan antara sekutu Barat dan keseimbangan di kawasan. Lantas hal tersebut memperlihatkan bahwa tiap-tiap identitas dalam lapisan berbeda membentuk kepentingan yang juga berbeda. Hal ini sesuai dengan yang telah dibahas sebelumnya bahwa keberadaan multipel identitas dapat memberikan ruang untuk menyesuaikan kepentingan mana yang sejalan dengan identitas negara tetapi juga memunculkan dilema tersendiri.

REFERENSI

BUKU DAN ARTIKEL DALAM BUKU

- Sen, Amartya. *Identity and Violence: The Illusion of Destiny*. New York: Norton, 2006.
- Snow, David A. "Identity Dilemmas, Discursive Fields, Identity Work, and Mobilization: Clarifying the Identity-Movement Nexus," in Jacqueliën van Stekelenburg et al (ed.), *The Future of Social Movement Research*. Minnesota: University of Minnesota Press, 2013.
- Telhami, Shibley & Michael Barnett, eds. *Identity and Foreign Policy in the Middle East*. Ithaca: Cornell University Press, 2002
- Waever, Ole. "Identity, communities and foreign policy: Discourse analysis as foreign policy theory", in L. Hansen & O. Waever (eds.), *European Integration and National Identity: The Challenge of the Nordic States*. London: Routledge, 2002.

JURNAL

- Bebler, Anton. "Crimea and the Russian-Ukrainian Conflict," *Romanian Journal of European Affairs* 15, no 1 (2015): 35-54.
- Bozdaglioglu, Yucel. "Modernity, Identity, and Turkey's Foreign Policy," *Insight Turkey* 10, no 1 (2008): 55-76.
- Settles, Isis H. "When Multiple Identities Interfere: The Role of Identity Centrality," *Personality and Social Psychology Bulletin* 30, no 4 (2004): 487-500.

TRANSKRIP PIDATO

- Demirel, Suleyman. A Role Model at Turbulent Crossroads, 1999, <http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/Turkey-a-role-model-at-turbulent-crossroads-full-transcript> (diakses 13 Desember 2017).

SITUS WEB DAN ARTIKEL DARING

- Bilefsky, Dan. "As if the Ottoman Period Never Ended," *The New York Times*, 29 Oktober 2012, <https://www.nytimes.com/2012/10/30/movies/in-turkey-ottoman-nostalgia-returns.html> (diakses 10 September 2019).
- En.oxforddictionaries.com.<https://en.oxforddictionaries.com/definition/contradiction> (diakses 18 Oktober 2019).
- Hurriyet Daily News. "Turkey Says it is Against EU Sanctions on Russia," 11 Agustus 2017, <http://www.hurriyetaidailynews.com/turkey-says-it-is-against-eu-sanctions-on-russia---116601> (diakses 17 Agustus 2019).
- Hurriyet Daily News. " Turkey Stands with EU and NATO on Crimea: Davutoglu," 19 Maret 2014, www.hurriyetaidailynews.com/turkey-stands-with-eu-and-nato-on-crimea-davutoglu-63790 (diakses 18 Oktober 2019).
- Kiper, Cinar. "Sultan Erdogan: Turkey's Rebranding Into the New, Old Ottoman Empire," *The Atlantic*, 5 April 2013 <https://www.theatlantic.com/international/archive/2013/04/sultan->

erdogan-turkeys-rebranding-into-the-new-old-ottoman-empire/274724/ (diakses 15 Juni 2019).

Kalishevskiy, Mikhail. "Recep Erdogan's "Crimean dilemma," Ferghana News, 19 September 2014, <http://enews.ferghananews.com/articles/2886> (diakses 10 Maret 2018).

Levent Basturk. "Turkey's Policy Towards Ukraine: Crimean Crises," World Bulletin, 26 Maret 2014, <https://www.worldbulletin.net/news-analysis/turkeys-policy-towards-ukraine-crimean-crisis-h132095.html> (diakses 6 April 2019).

Schön, Anna Marisa. "The Construction of Turkish National Identity: Nationalization of Islam & Islamization of Nationhood," Netherlands: Tilburg University. 2013. https://www.tilburguniversity.edu/sites/tiu/files/download/Anna%20Marisa%20Schoen%200/20The%20Construction%20of%20Turkish%20National%20Identity_2.pdf (diakses 10 Maret 2018).

Spencer-Rodgers, Julie et al, 'The Dialectical Self-Concept: Contradiction, Change, and Holism in East Asian Cultures', 2009 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2811254/> (diakses 18 Oktober 2019).

LAMAN RESMI

President of Russia. *Address by President of The Russian Federation*, 2014. <http://en.kremlin.ru/events/president/news/20603> [diakses 15 Agustus 2019].

Ministry of Foreign Affairs. *Press Release Regarding the Referendum held in Crimea*. No: 86, 17 March 2014, http://www.mfa.gov.tr/no_-86_-17-march-2014_-press-release-regarding-the-referendum-held-in-crimea.en.mfa (diakses 10 Maret 2018).

Presidency of The Republic of Turkey. *Turkey will not recognize the unlawful annexation of Crimea*, 2016, <https://www.tccb.gov.tr/en/news/542/40105/turkey-will-not-recognize-the-unlawful-annexation-of-crimea.html> (diakses 10 Maret 2018).

YEARBOOK

Morin, Aysel & Ronald Lee. *Constitutive Discourse of Turkish Nationalism: Ataturk's Nutuk and the Rhetorical Construction of the "Turkish People"*. Papers in Communication Studies, 2010.